

ANALISIS GAGALNYA KOPERASI DI KOTA BATAM

Tiurniari Purba

Dosen Fakultas Bisnis Universitas Putera Batam

Heryenzus

Dosen Fakultas Bisnis Universitas Putera Batam

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems in cooperative institutions located in the Batam City, especially issues concerning the resources of civil servants of the cooperative service, coaching programs and assistance of the cooperative service, infrastructure facilities from the cooperative office, communication and coordination between cooperatives with stakeholders. The population in this study is cooperative in Batam City area, especially in nine districts with 844 cooperatives. This research uses qualitative research with case study approach because the problem in this research happened directly in real life. Case study data can be obtained not only from the cases studied, but also can be obtained from all parties who know and know the case well. In other words, the data in the case study can be obtained from various sources but limited in the case to be investigated. The results showed that the Office of PMP KUKM Batam City to enliven the cooperatives of 922 cooperatives and 526 of them have died and some are dispersed, never know despair. Coaching and mentoring programs, training human resources of cooperative, fixing infrastructure, and connecting communications and coordination between cooperatives and stakeholders, never enough even there is always the latest effort like cooperative consultation clinic. The counseling consultative clinic is directed or follows the roadmap or milestone in the short, medium and long term.

Key words: Cooperative, Case Study.

PENDAHULUAN

Koperasi Indonesia lahir dengan nilai-nilai dan prinsipnya sendiri yang sangat ideal, yang tidak memfokuskan pada individu dan keuntungan yang maksimal, melainkan pada kebersamaan dan untuk kesejahteraan anggota. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral perekonomian nasional. Hal ini wajar, karena koperasi merupakan perkumpulan orang (anggota), sehingga anggotalah sebagai pemilik sekaligus pengguna koperasi. Koperasi Indonesia khusus ditangani oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia. Untuk wilayah provinsi dan kabupaten, penanganan koperasi dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM (PMP K-UMKM).

Koperasi seharusnya sebagai badan usaha yang sesuai dengan ciri-ciri untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Djohan, 2014; 19). Hingga akhir Tahun 2014 (<http://www.depkop.go.id>), progres keberadaan produktivitas koperasi di Indonesia masih rendah. Total jumlah koperasi yang memiliki legalitas di Indonesia sebanyak 209.488 unit, yang tidak aktif atau badan hukumnya dibekukan sebesar 29,7%. Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan kondisi

sebelum dicabutnya Inpres Nomor 4 tahun 1984 dan diganti dengan Inpres 18 tahun 1998 tentang pengembangan koperasi. Pergantian Inpres ini menyebabkan Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi gugur dengan maksud pemerintah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja (Subandi, 2011; 15).

Kalau hanya sekedar mengenalkan apa itu koperasi kepada masyarakat umum oleh pemerintah tidaklah sulit, hal ini terbukti dengan produktifnya koperasi di negara-negara maju seperti, Jepang, Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan negara lainnya. Koperasi berawal dari Eropa, seharusnya keberadaan koperasi itu di Indonesia sesukses di Eropa atau negara-negara lainnya. Konsumen di Singapura, Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (ICA: www.ica.coop; 2008). Bahkan di negara-negara maju tersebut, mereka berusaha mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi dengan harapan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya (Mutis dalam Sukidjo 2008; 196).

Banyak kalangan yang menganggap koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Anggapan ini harus dibuktikan secara riil agar koperasi selevel dengan BUMN dan BUMS (Hendar, 2010; 2) Apabila pemerintah ingin menjadikan koperasi sebagai alat pembangunan, tidak perlu menyebabkan koperasi itu terus tergantung pada bantuan yang diberi. Peranan pemerintah dalam pengembangan koperasi hanya terbatas pada upaya membangun koperasi yang mandiri (berswadaya). Pembangunan kopersai dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama pemerintah memegang peranan utama dalam perintisan organisasi koperasi dan membantu organisasi tersebut agar dapat tumbuh dengan kuat. Pada tahap kedua, pemerintah mencoba mengurangi bantuannya bila kopersai tersebut telah menunjukkan kemajuannya dan mempunyai kemampuan untuk berkembang kearah kemandirian. Bila kopersai telah mandiri, maka tahap berikutnya adalah pemerintah harus benar-benar menghentikan bantuannya (Heriyono, 2012; 41).

Dalam ruang lingkup nasional, kalau dilihat jumlah koperasi yang tidak aktif yaitu sebanyak 62.218 koperasi, sudah melewati seperempat dari total jumlah koperasi di Indonesia. Sementara masuk ke wilayah kota yaitu seperti Kota Batam, yang menjadi sorotan dalam penelitian ini dengan 12 kecamatan di Kota Batam diperoleh dalam Table 1 menunjukkan ada 922 koperasi yang terdaftar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam (PMP-KUKM) dan 526 diantaranya tidak aktif bahkan terancam akan bubar. Jenis-jenis koperasi dari 922 ini beragam. Sangat tragis tapi kenyataan ini tidak menyita perhatian berbagai pihak terutama lembaga-lembaga yang terkait bahkan sekalipun ada khusus kementerian yang mengurus koperasi tidak menjamin lebih banyak koperasi yang aktif dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif dan bubar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMK-UKM) Kota Batam menjelaskan, kriteria koperasi yang kualitas standar di antaranya berkontribusi terhadap pembangunan daerah, ada rapat tahunan, adanya progres perkembangan aset, dan kemampuan pelayanan sementara koperasi di Batam hampir tidak berkualitas atau tidak memenuhi standar (<http://posmetrobatam.com/2014>).

Sebanyak 922 koperasi yang terdaftar resmi di Kota Batam, kota yang dijuluki dengan kota industri tapi mengapa sebanyak 526 Koperasi (57%) dari jumlah itu tidak aktif bahkan terancam akan bubar. Kota industri adalah salah satu peluang yang sangat

menjanjikan untuk semua jenis usaha tanpa memandang usaha kecil atau besar. Selain itu kota ini terbentang ditengah-tengan kekayaan laut yang bisa diolah menjadi apa saja secara sederhana melalui usaha kecil-kecilan.

Tabel 1 Jumlah Koperasi Yang terdaftar di Dinas PMP KUMKM Kota Batam

No.	Kecamatan	Jumlah Kop.	Jumlah Kop. Aktif	Jumlah Kop. Tidak Aktif
1	Batam Kota	142	56	40
2	Nongsa	74	24	32
3	Bengkong	60	24	36
4	Batu Ampar	105	37	68
5	Sekupang	143	63	80
6	Belakang Padang	29	13	16
7	Bulang	25	10	15
8	Sagulung	78	37	41
9	Galang	24	13	11
10	Lubuk Baja	134	38	96
11	Sungai Beduk	88	58	30
12	Batu Aji	73	35	38
Jumlah		922	415	526

Sumber: Dinas PMP-KUKM 2014

Hasil paparan Kepala Dinas PMP-KUKM Batam pada Maret 2015 memaparkan permasalahan yang berlarut-larut dalam tubuh perkoperasian di Kota Batam sesuai dengan survey, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM (Subandi, 2011; 133).
2. Tidak terdapat pembinaan dan pendampingan khusus kepada koperasi oleh PNS maupun stakeholders.
3. Jumlah kopersi yang tidak aktif selalu bertambah tiap tahun, tercatat Tahun 2014 sebanyak 526 koperasi tidak aktif dan terancam akan bubar dengan sendirinya.
4. Tidak tersedianya sarana dan prasarana komunikasi khusus pelayanan koperasi dan UMKM.
5. Tidak maksimalnya komunikasi dan koordinasi antara stakeholders guna memberikan pelayanan kepada koperasi dan UMKM.

Masalah-masalah ini tidak asing, bahkan apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dikota lain di Indonesia, masalah yang sama yang selalu menjadi kendala utama ditambah dengan masalah-masalah seperti:

1. Rendahnya komitmen pemerintah untuk terlibat penuh.
2. Image koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang-orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar, maju dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan besar.
3. Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (*bottom up*) tetapi dari atas (*top down*), artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi

terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja.

4. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman.
5. Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
6. Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana-dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri.
8. Kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi.

Itulah penyebab-penyebab kenapa perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal. Sekarang yang menjadi sorotan utama penelitian ini adalah apakah permasalahan yang diutarakan oleh Dinas Koperasi Batam yang menjadi pemicu utama sebanyak 526 koperasi menjadi tidak aktif dan bahkan akan terancam bubar. Berdasarkan data struktur organisasi PMP-KUKM, diperoleh jumlah pegawai yang terdaftar sebanyak 24 Pegawai dengan kapasitas pada setiap bidang sebagai berikut:

Table 2 Jumlah Pegawai di Dinas PMP-KUKM Kota Batam

Bagian/Bidang	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris bagian	: 3 orang
Kepala Bidang Program	: 3 orang
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: 3 orang
Kepala Bidang Pasar	: 3 orang
Kepala Bidang Pasar	: 3 orang
Kepala Bidang Pembinaan Produksi dan Jaringan UKUKM	: 3 orang
Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan KUKM	: 3 orang
Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir (PDB)	: 1 orang
Kasubag Tata Usaha UPT PDB	: 1 orang
Jumlah Pegawai	: 24 orang

Sumber: Dinas PMP-KUKM 2014

Tugas pokok Dinas PMP-KUKM Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas PMP-KUKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di atas, Dinas PMPKUKM Kota Batam mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pasar, bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah serta bidang pembinaan produksi dan jaringan usaha kecil menengah.
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. <http://skpd.batamkota.go.id/koperasi/dinas-pmp-kukm-kota-batam>.

Bentuk rencana strategis Dinas PMP-KUKM sangat jelas tertuang dalam RENSTRA PMP KUKM dengan sasaran akhir tahun 2016, persentase koperasi aktif sebanyak 53 koperasi. Bukti RENSTRA ini untuk mendukung pembinaan dan pendampingan khusus kepada koperasi oleh PNS maupun *stakeholders*.

Table 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Stretegis Dinas PMP-KUKM
Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Stretegis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA	
			AWAL	AKHIR
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM)	Prosentase UKM Aktif	36	65%
	Memfasilitasi dan Mempermudah Upaya Masyarakat untuk mengakses KUR pada Industri dan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah	Prosentase (Jumlah) UKM mendapatkan akses dari BPR/LKM	40	52%
2	Mendorong Berkembangnya Jumlah Koperasi Berbagai Jenis Usaha	Prosentase (Jumlah) UKM mendapatkan akses dari Non BPR/LKM	45	59%
		Prosentase koperasi aktif	53	85%

Sumber: Dinas PMP-KUKM 2014

Sebagai perbandingan penyebab gagalnya koperasi dengan suksesnya koperasi, berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai koperasi di Indonesia yang sukses, (Jangkung Handoyo Mulyo dalam Sukidjo 2008; 200) mengidentifikasi beberapa factor kunci sukses dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pemahaman pengurus dan anggota terhadap jati diri koperasi, yang dicitrakan oleh pengetahuan mereka terhadap ‘tiga serangkai koperasi’ yang meliputi

pengertian koperasi (*definition of co-operative*), nilai-nilai koperasi (*values of cooperative*) dan prinsip-prinsip gerakan koperasi (*principles of co-operative*). Setelah dipahami, selanjutnya diimplementasikan dalam setiap aktivitas koperasi.

2. Kemampuan pengurus untuk mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggota. Melalui penjarangan aspirasi anggota akan dapat diketahui berbagai kebutuhan yang diinginkan anggota, sehingga akan dapat diidentifikasi kebutuhan kolektif para anggota.
3. Adanya kesungguhan pengurus dan pengelola dalam mengelola koperasi. Untuk itu pengurus dan pengelola perlu kerja keras, ulet, inovatif, pantang menyerah, jujur dan transparan. Agar koperasi berhasil, diperlukan figur pengurus yang memang benar-benar dapat mengemban amanah anggota.
4. Kegiatan usaha koperasi harus bersinergi dengan usaha anggota, sehingga koperasi akan mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya apa yang diperlukan anggota.
5. Biaya transaksi antara koperasi dengan anggota lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya transaksi antara anggota terhadap badan usaha non koperasi.

Berdasarkan data dan permasalahan yang dipaparkan diatas maka untuk langkah selanjutnya peneliti ingin melanjutkan dalam proses penelitian dalam judul Analisis Gagalnya Koperasi di Kota Batam. Secara spesifik tujuan dari penelitian adalah: Untuk mengetahui sumbangsih jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Kelembagaan Koperasi terhadap aktifnya koperasi di Kota Batam. Untuk mengetahui sumbangsih pembinaan dan pendampingan khusus kepada koperasi oleh PNS maupun stakeholders terhadap aktifnya koperasi di Kota Batam. Untuk mengetahui sumbangsih tidak sarana dan prasarana komunikasi khusus pelayanan koperasi terhadap aktifnya koperasi di Kota Batam. Untuk mengetahui sumbangsih maksimalnya komunikasi dan koordinasi antara stakeholders guna memberikan pelayanan kepada koperasi terhadap aktifnya koperasi di Kota Batam.

Cakupan dalam penelitian ini hanya membahas tentang sumber daya manusia pegawai negeri sipil dinas koperasi, program pembinaan dan pendampingan dinas koperasi, sarana prasarana koperasi, komunikasi dan koordinasi anatra koperasi dengan stakeholders di Kota Batam terhadap 922 Koperasi.

TINJAUAN TEORETIS

Penelitian ini didukung oleh berbagai kajian empiris dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi landasan berfikir. Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini dengan hasil dan metode analisis yang berbeda pernah dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suprayitno; 2007 dengan judul Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). beliau menghasilkan kesimpulan bahwa tidak sedikit tentangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi saat ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor.

Penelitian pendukung berikutnya adalah dengan judul Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat oleh Heriyono; 2012 dengan temuan, 1) pendekatan pengembangan yang harus dilakukan adalah pendekatan pengembangan kelembagaan secara partisipatif dan menghindari pengembangan yang berdasarkan pada

kepatuhan atas arahan dari lembaga lain, masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan sendiri. Dalam hal ini proses pendidikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi menjadi factor kunci yang sangat menentukan. 2) Diperlukan kerangka pengembangan yang memberikan aspirasi terhadap keragaman lokal yang disertai oleh berbagai dukungan tidak langsung tetapi jelas memiliki semangat kepemihakan pada koperasi dan ekonomi rakyat. Dengan demikian strategi pengembangan yang perlu dikembangkan adalah strategi yang partisipatif. Hal ini akan membutuhkan pendekatan yang mendasar di bandingkan dengan strategi yang selama ini diterapkan. Rekonseptualisasi sekaligus revitalisasi peran pemerintah akan menjadi faktor yang paling menentukan dalam perspektif pengembangan partisipatif.

Sementara hasil penelitian dengan judul Membangun Citra Koperasi Indonesia oleh Sukidjo 2008, mengemukakan bahwa untuk dapat mempertahankan eksistensi koperasi, maka pengurus dan anggota koperasi senantiasa harus memahami dan mengimplementasikan jatidiri koperasi, pembentukan koperasi atas dasar kesadaran anggota (*bottom-up*), kegiatan usaha luwes dan sinergis dengan kebutuhan anggota, pengurus jujur dan bekerja keras, berorientasi pada pelayanan anggota dan mampu menciptakan biaya transaksi antara koperasi dengan anggota lebih rendah dibanding biaya transaksi antara anggota dengan non koperasi. Untuk membangun kembali citra koperasi, pemerintah perlu secara konsekuen melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945, meningkatkan *political will* dengan menciptakan kebijaksanaan guna melindungi koperasi dan memberikan iklim yang kondusif, meningkatkan kerjasama kemitraan antar badan usaha, mengurangi pemberitaan negatif dan menonjolkan pemberitaan positif tentang koperasi, menanamkan jiwa dan semangat koperasi melalui pendidikan serta meningkatkan wawasan dan semangat kewirausahaan dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki hubungan dengan koperasi sehingga salah satu hasil penelitian yang mengungkapkan factor-faktor keberhasilan KUD dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian dengan judul Pemberdayaan KUD Melalui analisis factor-faktor kunci manajemen (Sulistyo Sidik Purnomo dan Briljan Sudjana; 2010) yang menghasilkan temuan bahwa keberhasilan KUD ditentukan oleh kinerja financial dan kinerja operasional, dijadikan salah satu rujukan utama.

Menurut *Britannica Concise Encyclopedia*, Koperasi atau *Cooperative Organization* bermakna *organization owned by and operated for the benefit of those using its services*. Makna mudahnya adalah organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan penggunanya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi berawal dari kata "*co*" yang berarti bersama dan "*operation*" (operasi) artinya bekerja sehingga koperasi diartikan bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI (lihat Wikipedia Indonesia). Tokoh nasional yang gigih mendukung koperasi adalah Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, sehingga beliau disebut Bapak Koperasi Indonesia.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 dalam

<http://www.depkop.go.id> Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Ukuran Koperasi

Berdasarkan omzetnya ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil.

1. Koperasi besar mempunyai omzet per tahun diatas Rp 1 Milyar.
2. Koperasi menengah mempunyai omzet per tahun antara Rp 500 juta - Rp 1 M.
3. Koperasi kecil mempunyai omzet per tahun kurang dari Rp 500 juta.

Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 pasal 83 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Koperasi simpan pinjam
2. Koperasi konsumen
3. Koperasi produsen
4. Koperasi jasa

Fungsi dan peran Koperasi Indonesia menurut UU 17 tahun 2012

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi

Ketentuan dan prinsip koperasi juga cukup banyak dan berasal dari Menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 6, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan koperasi.
- g. Kerja sama antar koperasi.

Hambatan Sekaligus Kritik Terhadap Koperasi

Secara umum jika diinventaris maka kendala yang juga bisa dianggap kritik yang

dihadapi oleh koperasi ada dari berbagai sisi sebagaimana berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Konflik Kepentingan dari Sisi Konsep Koperasi
3. Keuangan. Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi keuangan (*financial condition*) badan usaha tersebut.
4. Rendahnya Etos Kerja Personal dalam Koperasi. Rendahnya etos kerja ini selain berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM juga bisa disebabkan karena kurang adanya rangsangan untuk meningkatkan gairah kerja para personel yang terlibat dalam kegiatan koperasi sendiri.
5. Kurang Bisa Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) Baik Dalam Pengembangan Produk Maupun Pemasaran.

Perbandingan Koperasi di Berbagai Negara

Konsep koperasi adalah konsep umum yang berlaku di seluruh dunia. Ciri khas koperasi dapat dipandang sebagai jati diri yang sejak kelahirannya hingga dewasa ini tetap eksis meskipun politik, ekonomi, social dan budaya dunia mengalami berbagai perubahan. Menurut Ibnu Sudjono dalam Sukidjo (2008; 195) kekhasan (ciri khas) koperasi secara universal dapat dicirikan ke dalam tiga hal, yakni:

1. Nilai-nilai sosial merupakan bagian integral prinsip-prinsip koperasi.
2. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang (*people based-association*).
3. Prinsip-prinsip koperasi merupakan garis pemandu atau penuntun pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, di mana pengendalian dilakukan secara demokratis dan surplus ekonomi dibagikan atas besar-kecilnya jasa anggota terhadap koperasi.

Menurut Subiyakto Tjakrawerdaja (2007; 98) ide koperasi sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari negara Eropa. Oleh sebab itu, peran koperasi di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di berbagai Negara, koperasi dijadikan sebagai salah satu bentuk dari suatu badan usaha yang dimiliki oleh banyak orang, dengan prinsip satu anggota satu suara. Koperasi Indonesia tidak hanya sekedar itu, melainkan masih diberikan peran yang strategis dalam pembangunan yakni sebagai sarana untuk pengentasan kemiskinan. Konsep koperasi merupakan konsep umum dunia, namun ketika koperasi akan diterapkan di Indonesia yang digagas oleh Bung Hatta muncul perbedaan yang mendasar tentang konsep Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia tidak sekedar sebagai badan usaha seperti firma, perseroan terbatas, tetapi koperasi Indonesia merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti membutuhkan sebuah metode (desain penelitian). Dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif karena paradigma, proses, metode, dan tujuannya berbeda, penelitian kualitatif memiliki model desain yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Tidak ada pola baku tentang format desain penelitian kualitatif, sebab; (1) instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga masing-masing orang bisa memiliki model desain sendiri sesuai seleranya, (2) proses penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga sulit untuk dirumuskan format yang baku, dan (3) umumnya penelitian kualitatif berangkat dari kasus atau fenomena tertentu, sehingga sulit untuk dirumuskan format desain yang baku. Namun demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode *case study*. Alasan pemakaian metode ini adalah karena Lewat Studi Kasus sebuah peristiwa akan terangkat ke permukaan hingga akhirnya menjadi pengetahuan publik (Creswell, 2010).

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Batam yang terdiri dari 12 kecamatan. Alasan pemilihan lokasi Kota Batam adalah karena untuk menunjang perekonomian masyarakat [Kota Batam](#), koperasi memegang peranan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (Hendar, 2010; 2).

Populasi

Dalam penelitian ini, pada bab sebelumnya disebutkan bahwa jumlah koperasi di Kota Batam adalah sebanyak 922 Koperasi, jumlah ini adalah sekaligus sebagai jumlah populasi dalam penelitian ini. Akibat dari keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu Keseluruhan populasi tidak mungkin dapat diteliti. Oleh karena itu, tiga kecamatan yang berada diluar wilayah Pulau Batam yaitu, Galang, Bulang dan Belakang Padang, tidak termasuk dalam populasi penelitian ini. Hasilnya menjadi 844 koperasi yang tersebar di sembilan kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Selain wawancara mendalam, ada empat teknik pengumpulan data dalam penelitian Studi Kasus ini, yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (*participant observation*). Sumber data adalah Dinas PMP KUKM Kota Batam, 844 koperasi yang menyebar di sembilan kecamatan, stakeholders, dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.

Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data Studi Kasus dan penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab, sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti.

Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab, dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik peneliti pada bidang koperasi, pengalaman penelitian, bimbingan pakar koperasi, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Proses Analisis Data.

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah

yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Tidak ada prosedur atau teknik analisis data yang baku dalam penelitian kualitatif, tetapi langkah-langkah berikut bisa digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini; a. Peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi secara umum (*general*) dari masing-masing transkrip, b. Pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khususnya (*specific messages*), c. Dari pesan-pesan khusus tersebut akan diketahui pola umum data. Selanjutnya, data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, analisis data Studi Kasus dimulai sejak peneliti di lapangan, ketika mengumpulkan data dan ketika data sudah terkumpul semua.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keberadaan koperasi di Kota Batam tidak berbeda dari kota lainnya yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan; bahwa kebijakan perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Kategori aktifitas badan usaha koperasi dalam penelitian ini adalah:

1. Teregistrasi, berbadan hukum, tidak aktif.
2. Teregistrasi, berbadan hukum, aktif, bangkrut.
3. Teregistrasi, berbadan hukum, aktif, rugi.
4. Teregistrasi, berbadan hukum, aktif, untung.
5. Teregistrasi, berbadan hukum, aktif, untung, progres – ekspansif.
6. Tidak teregistrasi, belum berbadan hukum, sedang dalam proses membangun Koperasi.

Jumlah koperasi di Kota Batam hingga Desember 2014 sebanyak 922 yang menyebar di 12 Kecamatan. Pada Table 4 sebaran koperasi sesuai dengan jumlahnya, sementara nama-nama koperasi tersebut dilampirkan, baik itu koperasi yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Jenis usaha koperasi di kelompokkan menjadi 11 seperti yang tertera pada tabel di bawah ini, baik itu dengan status aktif maupun tidak aktif. Setelah dilakukan ulang pengolahan data maka kondisi koperasi yang tidak aktif bukan 415 melainkan 473 koperasi, sementara status bubar sebanyak tiga koperasi.

**Tabel 4 Pendataan Ulang Jumlah Koperasi Yang terdaftar di Dinas PMP
KUMKM Kota Batam**

No.	Kecamatan	Jumlah Kop.	Jumlah Aktif	Kop. Tidak Aktif
1	Batam Kota	142	56	40
2	Nongsa	74	24	32
3	Bengkong	60	24	36
4	Batu Ampar	105	37	68

5	Sekupang	143	63	80
6	Belakang Padang	29	13	16
7	Bulang	25	10	15
8	Sagulung	78	37	41
9	Galang	24	13	11
10	Lubuk Baja	134	38	96
11	Sungai Beduk	88	58	30
12	Batu Aji	73	35	38
Jumlah		922	415	526

Sumber: Dinas PMP KUMKM 2013

Koperasi menurut bidang usaha yang dilakukan di Kota Batam ada beberapa jenis sesuai dengan jenis koperasi yang tertera dalam Undang-Undang: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Akan tetapi realisasi jenis koperasi sesuai dengan kebutuhan di Kota Batam, bila dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Jenis Koperasi Terdaftar di Dinas PMP KUMKM Kota Batam

Jenis Koperasi		Jumlah Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Aktif
1	K. Pemukiman	5		NA
2	K. Fungsional TNI Polri	2		NA
3	K. Wanita	3		NA
4	K. Karyawan	97		NA
5	K. Lain-lain	313		NA
6	K. KPRI	22		NA
7	K. Pasar	10		NA
78	K. Pedagang kaki lima	3		NA
89	KUD	2		NA
10	Koppontren, Syariah, KJKS	3		NA
11	Koptanel	15		NA
Jumlah		475		

Sumber: Dinas PMP KUMKM 2013

Pembahasan

Hasil Wawancara Dengan Pihak Dinas Koperasi

Pengamatan dan wawancara terstruktur yang diterapkan dalam penelitian ini memang menghasilkan data yang masih kacau. Untuk memilah dan memberi makna pada data tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus berpaling kepada teori-teori ekonomi yang relevan. Sebelum menetapkan temuan sebagai kecenderungan pokok, peneliti melakukan pengecekan anggota. Ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berapa proporsi kasus yang mendukung temuan, dan berapa yang bertentangan dengan temuan. Bila ada penyimpangan dalam kasus-kasus tertentu, peneliti menelaahnya secara lebih cermat.

Telaah lebih cermat terhadap kasus-kasus yang menyimpang sering disebut sebagai analisis kasus negatif. Teknik ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang saling bertentangan dengan maksud menghaluskan simpulan sampai diperoleh kepastian

bahwa simpulan itu benar untuk semua kasus atau setidaknya-tidaknya sesuatu yang semula tampak bertentangan, akhirnya dapat diliput aspek-aspek yang tidak berkesesuaian tidak lagi termuat. Dengan kata-kata lain dapat dijelaskan "duduk persoalannya".

Hasil wawancara untuk jawaban dari wawancara terstruktur dengan Perwakilan dari Dinas Koperasi secara lisan dirangkum sebagai berikut:

1. Pelayanan SDM Kelembagaan Koperasi Dinas PMP K-UMKM Batam

Pada bidang kelembagaan koperasi, jumlah pegawai baik yang PNS maupun non PNS adalah sebanyak Sembilan orang. Terdiri dari satu orang yang menjabat sebagai kepala bidang, tiga orang yang menjabat sebagai kepala seksi, dan satu orang yang menjabat sebagai PNS staf. Jadi semua pegawai PNS berjumlah lima orang. Sedangkan untuk pegawai non PNS berjumlah empat orang yang disebut sebagai Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. Terdiri dari dua orang perempuan dan dua orang laki-laki. Sehingga kalau ditotal semua pegawai yang PNS dan non PNS adalah sembilan orang.

Jumlah PNS termasuk pada golongan banyak atau sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah koperasi di kota Batam (data terbaru 930 oleh Bpk Febrialin). Memadainya atau apakah sudah banyak atau sedikit jumlah PNS yang ada jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada tentu jawabannya belum memadai, karena pertama jika dilihat dari segi kondisi geografis kota Batam yang terdiri dari dua karakteristik yaitu mainline seperti koperasi induk yang ada di kota Batami. Dan hiterline yang ada di pesisir atau di pulau-pulau. Segi yang kedua adalah luasnya kota Batam. Dibandingkan antara jumlah koperasi dan subpembina itu memang tidak proposional dan masih kurang. Idealnya, jika kita melihat dari SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) kurang memadai bagi dinas, karena dinas melayani pemberdayaan masyarakat, pasar, koperasi dan UKM. Dilihat dari segi fungsi cukup luas dan cukup banyak, sehingga akhirnya bidang-bidang tersebut dibagi-bagi. Bidang pasar yang melayani pasar, bidang koperasi yang melayani koperasi, bidang UKM yang melayani UKM dan bidang pemberdayaan masyarakat yang melayani pemberdayaan masyarakat. Di Kepri jumlah koperasi ada sekitar 1600 an dan 70% atau 60% nya ada di Batam. Intinya jumlah Pembina (PNS) dengan jumlah koperasi tidak proposional atau masih kurang jumlah tenaga kerjanya.

Minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibidang kelembagaan koperasi sebagai penentu atau berpengaruh pada banyak tidaknya aktif koperasi di Kota Batam. Dari pengalaman SDM kelembagaan koperasi salah satu faktor yang mempengaruhi. Tetapi kalau soal penentu masih perlu dikaji lebih mendalam. Kenapa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi karena didalam koperasi ini masih banyak keterbatasan. Seperti dari segi teori, ilmu pengetahuan, atau praktisi. Karena background orang bermacam-macam. Misalnya ada seseorang yang ditunjuk sebagai pengurus koperasi padahal belum tentu orang tersebut ahli di bidang koperasi, seperti dari lulusan sarjana hukum atau sarjana teknik yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan koperasi. Beda jika lulusan dari sarjana ekonomi yang memang masih berhubungan atau berkaitan dengan bidang koperasi. Hal seperti ini biasanya terjadi dalam koperasi yang bersifat masyarakat. Kebanyakan dalam koperasi masyarakat yang biasanya ditunjuk sebagai pengurus atau pengelola koperasi adalah seseorang yang terlihat menonjol padahal belum tentu orang tersebut ahli dalam koperasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Disitulah peran pemerintah, Pembina, PNS dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan untuk memberikan bimbingan teknis, pendampingan, melakukan sosialisasi, dan pelatihan baik secara konvensional maupun secara IT untuk memberikan informasi

guna meningkatkan kualitas SDM dari pengelola atau pengurus koperasi tersebut.”

2. Bentuk Pembinaan Koperasi oleh Kelembagaan Koperasi Dinas PMP K-UMKM Batam

Untuk ada tidaknya bentuk pembinaan dan pendampingan khusus kepada koperasi oleh Dinas Koperasi. Pembinaan dan pendampingan khusus yang dilakukan adalah melalui Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan. Pendekatannya adalah perwilayah karena kalau pendekatannya perkoperasi tidak akan tercover semuanya dengan jumlah pegawai yang sedikit dengan koperasi yang banyak tersebut. Namun meskipun begitu ada pembinaan dan pendampingan khusus yang perkoperasi. Sehingga dalam pendekatan ini menggunakan dua metode yaitu metode pendampingan khusus (per koperasi) dan metode pendampingan perwilayah, agar semua koperasi yang ada di Batam dapat tercover semua pembinaan dan pendampingannya.

Bentuk pembinaan tersebut yang disediakan oleh dinas koperasi adalah Pembinaan seperti mendatangi, *door to door* (pintu ke pintu), mendatangi kantornya, bertanya apakah koperasinya berjalan lancar atau ada kendala atau masalah apa yang sedang dihadapi, memberi masukan atau saran atas masalah yang sedang dihadapi oleh koperasi tersebut, adanya pelatihan (seperti pelatihan rapat anggota, pelatihan membuat pembukuan), ada study banding antar koperasi (mendatangi atau belajar dari koperasi yang terbaik atau yang bagus), adanya bimbingan teknis, pendampingan khusus bagi koperasi yang sedang ada masalah.

Selain ada bentuk pembinaan dari dinas koperasi, bagaimana dengan pembinaan dan pendampingan khusus kepada koperasi oleh stakeholders? Tidak jauh berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh perwakilan dinas koperasi Batam, adanya pembinaan, adanya pendampingan khusus, adanya pelatihan.

Bentuk efektifitas pembinaan dan pendampingan yang dinas koperasi lakukan efektif, jika dikatakan efektif, tolak ukurnya adalah ketersediaan SDM dengan objek yang tuju. Diawal sudah diketahui bahwa salah satu kendala gagalnya koperasi adalah terbatasnya SDM. Dengan terbatasnya SDM tersebut tentu tidak bisa efektif yang diinginkan secara umum. Tetapi keefektifan dibandingkan dengan ketersediaan SDM dengan hasil yang dicapai, saya rasa sudah dapat dikatakan efektif. Tetapi jika secara umum belum dapat dikatakan efektif, karena SDM kita yang terbatas tersebut. Dinas kita ini kan terlalu luas cakupannya, karena idealnya dinas koperasi itu dengan UKM. Jika dinas kita, dinas koperasi dan UKM saya rasa sudah dapat dikatakan efektif. Karena untuk porsi tujuannya itu sama. Dan dinas kita ini kan macam-macam tujuannya, ada koperasi, ada masyarakat, ada pasar dan ada UKM. Kendala atau masalah yang berat memang koperasi ini. Sudah jumlah koperasinya besar, SDM nya sedikit sehingga tidak dapat efektif dan memuaskan. Tetapi jika dilihat dari Pembina dan hasil yang dicapai sudah bagus progresnya. Terlihat dari jumlah koperasi yang sudah didatangi atau dibina oleh Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan selama enam bulan sudah dapat mendatangi atau membina 350-an koperasi yang ada. Dan untuk pembinaan selanjutnya dilakukan secara bertahap.

Seberapa besar pengaruh pembinaan dan pendampingan sebagai penentu aktifnya koperasi di Kota Batam. Untuk menjawab permasalahan ini perwakilan kelembagaan koperasi menuturkan bahwa lumayan besar, karena dengan adanya pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi, kita dapat mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi. Untuk koperasi yang terbilang dalam istilah mulai tidak aktif kita datang dan kita tanya kendala apa atau masalah apa yang mengakibatkan koperasi tersebut mulai tidak aktif lagi, dan kita carikan solusinya agar koperasi tersebut dapat terus aktif.

Untuk koperasi yang masih aktif kita lakukan pengawasan dan pembinaan agar tetap aktif.

3. Bentuk Sarana dan Prasarana Kelembagaan Koperasi Dinas PMP K-UMKM Batam

Bentuk ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan koperasi dari Dinas Koperasi. Jika dikatakan ada atau tidak adanya sarana dan prasarana koperasi yang diberikan, pastinya ada. Hanya saja jika pertanyaannya memadai atau tidak memadai, jujur saja belum memadai. Karena tidak ada kendaraan operasional yang dimana seharusnya disediakan oleh pemerintah. Sementara yang tersedia adalah seperti sarana prasarana berupa komputer, ruangan yang cukup, mesin fotocopy dan inventaris lainnya.

Sementara kalau ditelusuri pengaruh sarana prasarana ini adalah pendukung utama untuk menjalankan pembinaan oleh SDM Dinas Koperasi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat menjadi motivasi bagi koperasi untuk terus aktif dan berkembang. Dan harus diingat bahwa sangat penting membedakan bentuk sarana prasarana dengan dana segar. Koperasi harus dididik memanfaatkan sarana prasarana yang ada, bukan meminta dana gratisan sebagai modal awal dan lain lainnya.

4. Bentuk komunikasi dan koordinasi Kelembagaan Koperasi Dinas PMP K-UMKM Batam.

Bentuk komunikasi dan koordinasi dari dinas koperasi terhadap koperasi-koperasi yang hampir mati. Koperasi itu ibarat kita melayani orang. Kita harus tahu kendala atau masalah apa yang sedang terjadi pada koperasi tersebut. Jika kita sudah mengetahuinya baru kita berikan masukan atau solusi atas masalah yang sedang terjadi. Sehingga untuk setiap koperasi yang hampir mati tentu berbeda solusi yang diberikan, karena tentu berbeda masalah yang sedang terjadi antara koperasi yang satu dengan yang lainnya. Seperti untuk koperasi yang hampir mati akibat konflik antar pengurus, maka kita menyelesaikannya secara kekeluargaan. Untuk koperasi yang anggotanya sudah tidak aktif lagi, kita adakan penyuluhan, pemahaman tentang koperasi yang sebenarnya. Sehingga kita harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi dan koordinasi kepada koperasi yang akan hampir mati.

Berbeda dengan bentuk komunikasi dan koordinasi dari dinas koperasi terhadap koperasi-koperasi yang aktif dan berkembang. Dalam koperasi terdapat istilah pemeringkatan koperasi. Disinilah bagaimana supaya kita menjadikan koperasi yang cukup berkualitas naik menjadi koperasi dengan peringkat berkualitas atau sangat berkualitas. Yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak independen. Memberikan penilaian terhadap koperasi yang berprestasi sebagai award dari pemerintah dan dinas koperasi terhadap koperasi yang terus aktif dan berkembang pada tiap tahunnya yang diadakan pada saat hari peringatan ulang tahun koperasi.”

Sementara bentuk komunikasi dan koordinasi dari dinas koperasi terhadap koperasi-koperasi yang sudah mati. Tidak jauh berbeda dengan koperasi yang hampir mati. Untuk koperasi yang sudah mati, kita analisis terlebih dahulu penyebabnya. Jika penyebabnya karena anggota yang sudah tidak aktif lagi, maka kita adakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pemahaman tentang koperasi yang sebenarnya. Karena kadang ada orang yang beranggapan bahwa koperasi hanya tempat untuk meminjam uang tanpa mereka menabungkan kembali uangnya kedalam koperasi

tersebut. Karena prinsip koperasikan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Sehingga kita harus mengubah atau meluruskan pola pikir anggota yang salah tersebut menjadi memiliki pola pikir yang sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya, agar koperasi tersebut dapat aktif kembali.

Maksimal tidaknya komunikasi dan koordinasi antara dinas koperasi dengan koperasi yang ada. Belum maksimal, karena masih banyaknya kendala-kendala yang mengakibatkan koperasi menjadi tidak aktif lagi. Kalau kita maksimal pasti koperasi kita sekitar 80% lah minimal masih aktif beroperasi. Tapi kita ketahui bahwa koperasi di Batam ini hampir 50% nya sudah tidak aktif lagi. Itu artinya kita belum maksimal, tapi bukan berarti itu berasal dari kita, ya banyak faktorlah yang mempengaruhinya, seperti keterbatasannya SDM dan keterbatasan anggaran. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak berupaya, tetapi memang hasilnya belum memuaskan. Dan kita akan tetap berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada untuk membuat koperasi di Batam terus aktif dan menjadi maksimal.”

Bagaimana dengan komunikasi dan koordinasi antara stakeholders dengan koperasi guna memberikan pelayanan kepada koperasi? Pihak terkait di sini ada pemerintah, koperasinya sendiri dan juga perusahaan (untuk kopkar). Komunikasi dan koordinasinya melalui sosialisasi, mediamassa (tv, radio, koran), pertemuan, melalui publikasi (website), promosi melalui internet secara gratis (bagi UKM).”

Sinergitas Pelayanan Koperasi dan UMKM Sesuai Harapan Koperasi dan UMKM Di Kota Batam

Pengamatan dan wawancara terstruktur yang sama dengan Dinas PMP K-UMKM Batam juga diterapkan terhadap perwakilan koperasi yang aktif dan tidak aktif sebagai perbandingan dan mencari titik temu akan permasalahan yang diteliti sesuai dengan variabel 1. SDM Dinas PMP K-UMKM Batam. 2. Pembinaan dan Pendampingan Dinas PMP K-UMKM Batam. 3. Sarana Prasarana Dinas PMP K-UMKM Batam. 4. Komunikasi dan Koordinasi Dinas PMP K-UMKM Batam. Dari data lapangan memang menghasilkan data yang masih kacau. Untuk memilah dan memberi makna pada data tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus berpaling kepada teori-teori ekonomi yang relevan. Sebelum menetapkan temuan sebagai kecenderungan pokok, peneliti melakukan pengecekan anggota. Ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berapa proporsi kasus yang mendukung temuan, dan berapa yang bertentangan dengan temuan. Bila ada penyimpangan dalam kasus-kasus tertentu, peneliti menelaahnya secara lebih cermat.

Telaah lebih cermat terhadap kasus-kasus yang menyimpang sering disebut sebagai analisis kasus negatif. Teknik ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang saling bertentangan dengan maksud menghaluskan simpulan sampai diperoleh kepastian bahwa simpulan itu benar untuk semua kasus atau setidaknya-tidaknya sesuatu yang semula tampak bertentangan, akhirnya dapat diliput aspek-aspek yang tidak berkesesuaian tidak lagi termuat. Dengan kata-kata lain dapat dijelaskan "duduk persoalannya".

Hasil pengamatan dan wawancara terhadap koperasi yang tidak aktif adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan hubungan antara alat perlengkapan koperasi, khususnya antara pengurus dan manajer, yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain mengingat perlunya koordinasi yang mantab dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas.

- b. Kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai prakarsa pemerintah. Program-program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masih ada yang belum sepenuhnya dipadukan dengan program-program yang timbul dari prakarsa pemerintah.
- c. Organisasi tingkat sekunder, seperti Pusat Koperasi dan Induk koperasi, tampak belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kepada koperasi primer, khususnya meningkatkan kemampuan dalam bidang organisasi, administrasi, dan manajemen.
- d. Kerja sama koperasi dan lembaga non-koperasi telah ada yang berlangsung atas landasan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tetapi, apabila kurang hati-hati dalam membinanya ada kerjasama yang cenderung mengarah pada hilangnya kemandirian koperasi.
- e. Kemampuan pemupukan modal usaha yang bersumber dari anggota dan hasil usaha koperasi, walaupun cukup memadai perkembangannya namun ternyata masih sangat terbatas.
- f. Dalam usaha memperoleh kredit dari bank, koperasi masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Demikianlah, maka pemupukan modal koperasi walaupun cepat perkembangannya hasilnya masih terbatas juga.
- g. Keterpaduan gerak, pengertian, pembinaan, dan pengawasan terhadap gerakan koperasi dari berbagai instansi masih perlu ditingkatkan.
- h. Masalah lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan koperasi pada tingkat perkembangan seperti sekarang ini adalah masih kurangnya petugas pembina koperasi, baik dalam jumlah maupun mutunya.
- i. Masalah permodalan, penguasaan teknologi, akses informasi, permasalahan pemasaran, dan perlindungan hukum.
- j. Kurangnya dana sehingga fasilitas-fasilitas yang sudah ada tidak dirawat, hal ini menyebabkan koperasi tertinggal karena kemajuan teknologi yang sangat cepat.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, titik temu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi yang tidak aktif maupun aktif dengan Dinas PMP-KUKM menghasilkan kebutuhan dan harapan koperasi maupun usaha kecil menengah di Kota Batam adalah.

- a. Dinas PMP K-UMKM Batam aktif mensosialisasikan program peningkatan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah kepada masyarakat melalui kecamatan, kelurahan, RT dan RW.
- b. Dinas PMP K-UMKM Batam menyediakan klinik konsultasi dan pelayanan koperasi KUKM. Keberadaan klinik ini harus disosialisasikan untuk menjawab permasalahan masyarakat tentang koperasi dan KUKM.
- c. Mensinergikan program-program pembangunan dengan pemberdayaan koperasi.

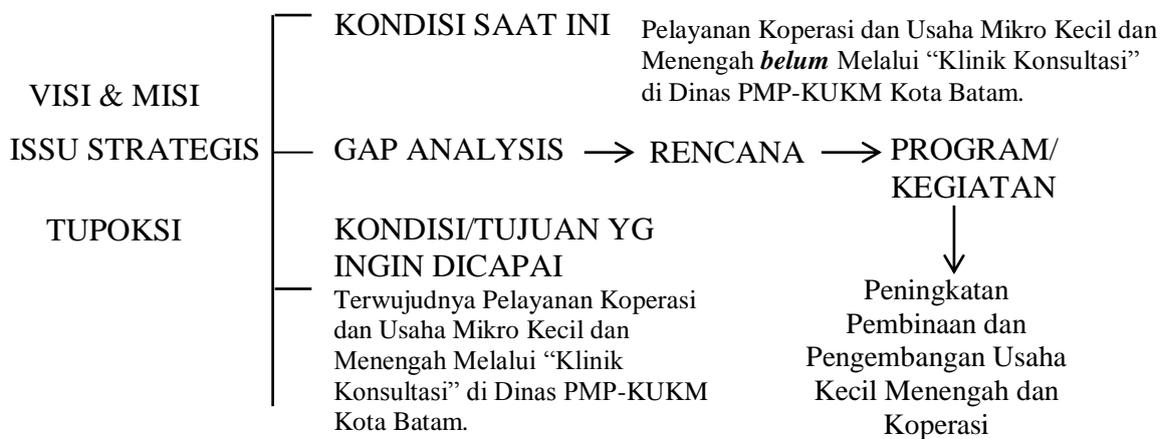
Solusi Sinergitas Dinas PMP K-UMKM Melalui Klinik Konsultasi Dasar Pembentukan

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

Uraian Tugas

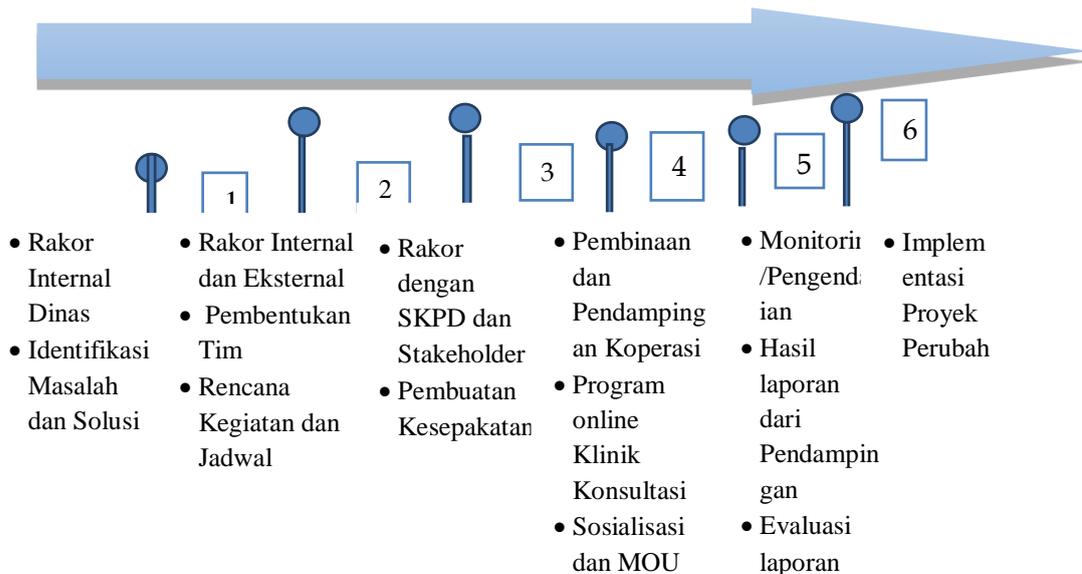
1. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.
2. Keputusan Walikota Batam Nomor: 395/H/X/2014 tentang Pembentukan Tim Klinik Konsultasi dan Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas PMP-KUKM Kota Batam tanggal 15 Oktober 2014.
3. Klinik konsultasi koperasi ini dibangun sebagai ruang pelayanan masyarakat koperasi yang ingin bertanya mengenai persoalan perkoperasian. Di ruang klinik konsultasi tersebut ada para praktisi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas KUMKMP Kota Batam.

Pokok Bahasan

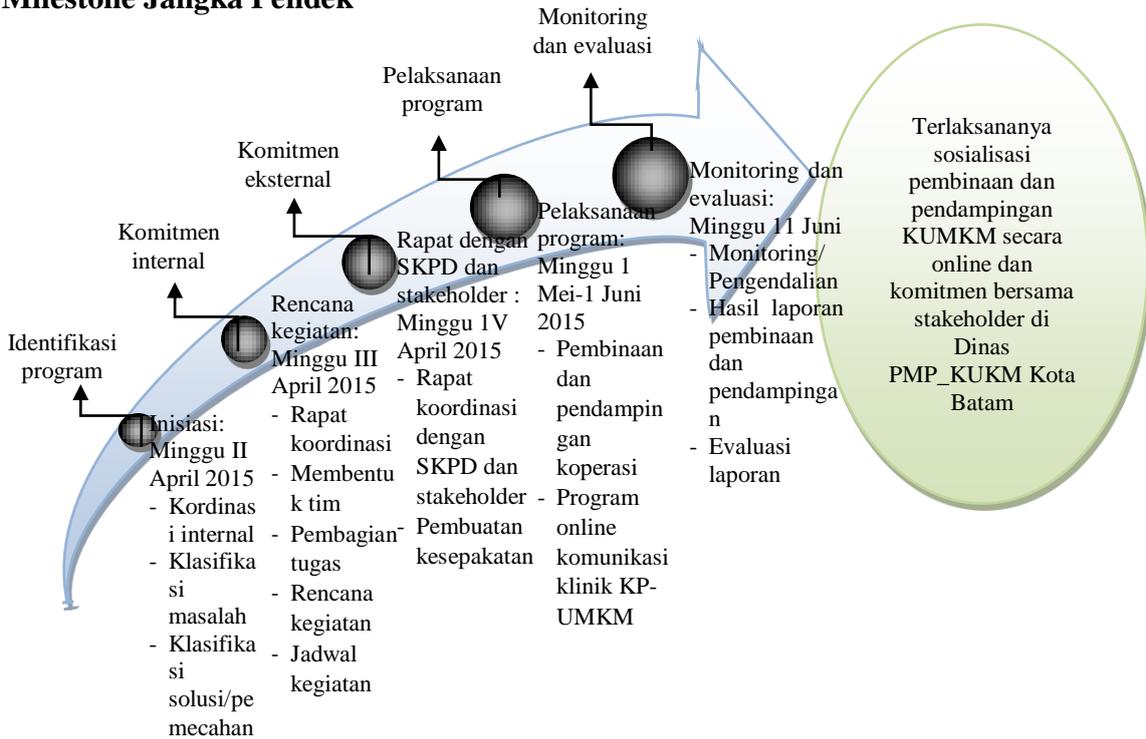


Gambar 1 Rancangan Pelayanan Dinas PMP-KUMKM

Roadmap/Milestone

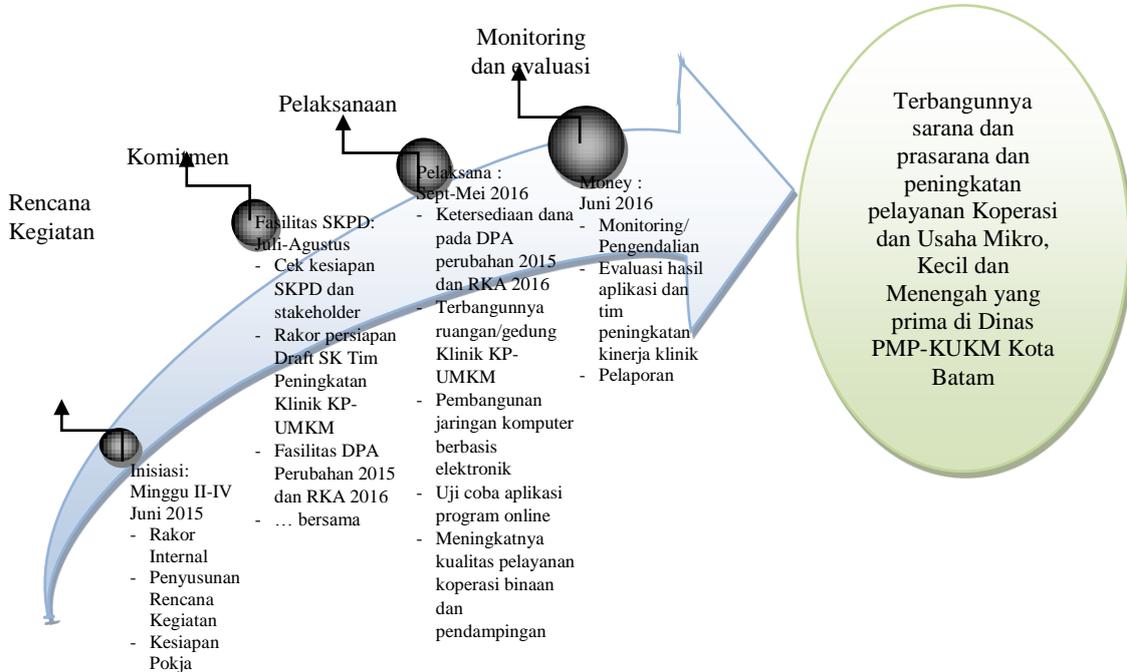


**Gambar 2 Rancangan Roadmap Dinas PMP-KUMKM
Milestone Jangka Pendek**



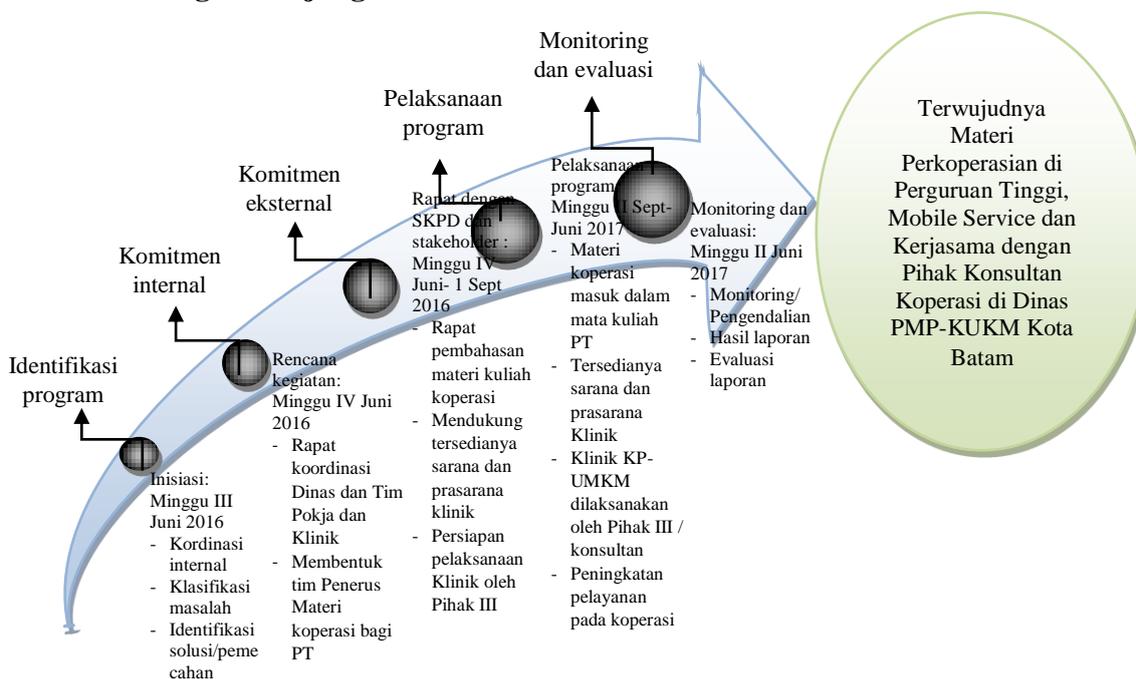
Gambar 3 Rancangan Roadmap Jangka Pendek Dinas PMP-KUMKM

Milestone Jangka Menengah



Gambar 4 Rancangan Roadmap Jangka Menengah Dinas PMP-KUMKM

Milestone Jangka Panjang



Gambar 5 Rancangan Roadmap Jangka Panjang Dinas PMP-KUMKM

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masalah perkoperasian di Indonesia selama bertahun tahun tidak berbeda. Dari hasil penelitian dan analisa literatur yang fokus pada permasalahan berikut ini; 1) SDM Dinas PMP K-UMKM Batam, 2) Pembinaan dan Pendampingan Dinas PMP K-UMKM Batam, 3) Sarana Prasarana Dinas PMP K-UMKM Batam dan, 4) Komunikasi dan Koordinasi Dinas PMP K-UMKM Batam, dapat disimpulkan bahwa:

1. SDM Dinas PMP K-UMKM Batam. SDM yang ada pada dinas PMP K-UMKM Batam serba terbatas, baik dari segi jumlah SDM maupun ilmu pengetahuan. Keterbatasan ini semakin membuka peluang pada banyaknya koperasi untuk tidak aktif bahkan bubar. Karena masalah yang sama pada setiap koperasi terjadi, keterbatasan pengetahuan tentang koperasi itu sendiri. Secara umum permasalahan yang timbul dalam pengembangan usaha koperasi berkaitan dengan empat hal yakni kualitas pengurus, partisipasi anggota, permodalan sendiri dan pengawasan. Hanya dengan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi, suatu masyarakat atau organisasi termasuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.
2. Pembinaan dan Pendampingan Dinas PMP K-UMKM Batam. Secara normatif pengelola (pengurus) dalam organisasi koperasi memiliki fungsi yang amat strategis yaitu bertindak sebagai pengusaha yang menjaga kesinambungan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang efisien. Rendahnya kualitas dari

pengurus koperasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya kemampuannya sebagai seorang wirausaha dalam mengelola koperasi. Kurangnya kesadaran akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal Kesadaran ini adalah pondasi utama bagi pendirian koperasi sebagai motivasi. Hal ini yang mengakibatkan proses manajemen koperasi lemah sehingga arah dan tujuan yang hendak di capai koperasi tidak bisa diraih terutama dalam peningkatan perkembangan usaha dari koperasi. Hal ini harus diperhatikan oleh SDM Dinas PMP K-UMKM Batam, pengurus koperasi membutuhkan pembinaan dan pendampingan hingga tahap mandiri.

3. Sarana Prasarana Dinas PMP K-UMKM Batam. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan koperasi sangat penting dilakukan untuk menunjang terlaksananya koperasi yang efektif. Pemerintah harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pengurus anggota maupun pengelola agar kegiatan dalam koperasi tidak terhambat dan menjadikan koperasi tidak berkembang. Jangan sampai terulang lagi masalah pemerintah terlalu memanjakan koperasi. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Pemerintah dalam hal ini pihak dinas harus bisa membedakan dana segar dengan saran prasarana. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi "manja" dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasannya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.
4. Komunikasi dan Koordinasi Dinas PMP K-UMKM Batam. Memberikan Motivasi dan Dorongan, serta Semangat Juang Pemuda/i Indonesia yang Berjiwa Pancasila dan BerkeNegaraan. Sosialisasi mengenai koperasi perlu dilakukan keberbagai lapisan masyarakat, kepada sekolah dasar, SMP, SMA, Universitas, Perusahaan, maupun lingkungan bermasyarakat. Sosialisasi pun dimaksimalkan dijalankan secara merata diberbagai daerah, perkotaan maupun pedesaan harus mendapatkan sosialisasi ini. Untuk itu perlu adanya sosialisasi ke masyarakat tentang koperasi, supaya koperasi bisa membuat wajah baru yang diinginkan para investor (masyarakat). Banyak cara mensosialisasikan koperasi tetapi jika tidak dibantu oleh pemerintah itu mungkin akan sulit dijalankan. Namun saat ini banyak para pengusaha rumahan yang ikut serta mempromosikan atau mensosialisasikan koperasi pada masyarakat. Dan keberadaan koperasi semakin diperkuat pula dengan dibentuknya Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan koperasi menjadi lebih berdaya guna.
5. Keputusan Walikota Batam Nomor: 395/H/X/2014 tentang Pembentukan Tim Klinik Konsultasi dan Pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas PMP-KUKM Kota Batam tanggal 15 Oktober 2014.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas koperasi dan UKM Kota Batam memberikan bimbingan teknis kepada pengurus koperasi berupa perencanaan, pengelolaan dan manajemen secara konsisten hingga mandiri.
2. Sebaiknya untuk membina koperasi yang sudah ada dibutuhkan orang-orang atau pegawai yang benar-benar memahami tentang koperasi secara baik. Pegawai yang menjadi pendamping koperasi sebaiknya diberikan pelatihan terlebih dahulu secara merata.
3. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara intensif agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan bahkan permasalahan yang terjadi di setiap koperasi yang ada.
4. Semua akan lebih mudah apabila klinik konsultasi bisnis yang sudah didesain oleh Dinas PMP-KUMKM terealisasi menjadi media untuk menampung dan mencarikan solusi atas persoalan tumbuh kembang koperasi
5. Untuk peneliti selanjutnya sangat diperlukan hasil wawancara dan kuesioner menyeluruh tentang bubarnya koperasi, aktifnya koperasi dan tidak aktifnya koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Djohan, Djabaruddin (2014). *Perkoperasian*. Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang.
- Hendar (2010) *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Heriyono (Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat *Jurnal Ekonomi* ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012.
- Jauhari, Hasan (2006). Mewujudkan 70.000 Koperasi Berkualitas. *Infokop*. No 28-XXII. Hal.1-9.
- Lincoln, Y.S. dan Guba, EC. (1985). *Cultural transfer in Communication: Naiuralisiic Inquiry*. Beverly Hills: Sage.
- Purnomo, Sulistyio Sidik dan Sudjana, Briljan (2010). Pemberdayaan KUD Melalui Analisis Faktor-Faktor Manajemen. *Jurnal Agrikultura*. Nomor ISSN 2303-1174
- Subandi (2011) *Ekonomi Koperasi, Teori dan Praktek*, Alfabeta bandung 2011
- Sukidjo (2012). Membangun Citra Koperasi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012.
- Suprayitno, Bambang (2007). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, ISSN 1829-8028 November 2007.
- Sularso. 2006. Membangun Koperasi Berkualitas: Pendekatan Substansial. *Infokop* Nomor 28-XXII. Hal 10-18.
- Subiyakto, T. (2007). <http://www.gemari.or.id/file/edisi78/gemari7847.PDF>
- _____ Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1967 Tentang Koperasi Indonesia.
- _____ Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.